



UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Mahadika Tegar Deritasari, Untung Dwi Hananto, Indarja

ABSTRAK

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Setiap daerah harus bisa mencermati sektor yang dapat menopang pembangunan di daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Banjarnegara sesuai yang telah digariskan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), sektor pariwisata secara riil merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah, karena posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan latar belakang tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul “UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA”.

Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara? Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan bagaimana mengatasi kendala yang ada?. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Banjarnegara, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana mengatasi kendala tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif Kualitatif yang penyajiannya berpangkal pada azas-azas, teori, doktrin serta perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta dihubungkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : bahwa strategi dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup optimal namun hasilnya belum begitu baik. Pengaturan pengembangan pariwisata untuk Kabupaten Banjarnegara adalah Peraturan Daerah Nomor 163 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. Untuk mengatasi kendala yang ada, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan birokrasi untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta pengembangan pariwisata pada masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Kata Kunci: **Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Pariwisata. Abstrak Inggris**



ABSTRACT

To create a society that is fair and equitable prosperous material and spiritual according to Pancasila and The 1945 Constitution that the construction carried out by the Indonesian nation is development in all areas of life. Each area should be able to look at the sector that can sustain development in their respective regions. In accordance Banjarnegara District which has been outlined in the Regional Development Program (PROPEDA), in real terms the tourism sector is one of the strategic sectors driving regional economic development and regional development, because of the strategic position held Banjarnegara district. Based on the background is exactly what makes the writer interested to take the title “ REVENUE IMPROVEMENT EFFORTS THROUGH THE TOURISM SECTOR IN DISTRICT BANJARNEGARA “.

The problem formulation in this paper is how the tourism development strategy and arrangements to increase regional income in Banjarnegara? What are the constraints faced by the department of culture and tourism and how to overcome existing constraints?. Thus the purpose of this study is to determine the strategy and development settings to improve the revenue of tourism in Banjarnegara District, to know the constraints faced by the department of culture and tourism in increasing revenue in Banjarnegara District and how to overcome these obstacles.

In this study the method used is the Method Of Qualitative Normative Juridical approach that stems presentations on the principles, theory, doctrine and applicable legislation. Specifications of the research is descriptive analysis. In this study, the data used is primary data and secondary data. After the primary data and secondary data collected, then analyzed the data qualitatively.

Based on the research and analysis of the data and is connected with the problems posed by the authors in this study, the conclusions can be drawn as follows : that the tourism development strategy and to increase regional income in the district is quite optimal Banjarnegara but the results are not so good. Arrangements for the development of tourism is Banjarnegara Regional Regulation No. 163 Of 2009 on Main Duties and Job Description Position and Function at the Department Of Culture and Tourism Banjarnegara District. To overcome the existing obstacles, The Department Of Culture and Tourism Banjarnegara promote cooperation among tourism stakeholders. Government gives easiness bureaucracy to attract investors to invest their capital. Increasing awareness and responsibility in protecting the environment as well as the development of tourism on society Banjarnegara District.

KEYWORDS : REGIONAL REVENUE (PAD) , DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM , TOURISM .



Pendahuluan

Pembangunan Nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan di segala bidang kehidupan. Pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah secara riil merupakan titik tolak yang sangat strategis bagi daerah untuk dapat menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset yang dimiliki serta memberdayakannya bagi pembangunan perekonomian daerah setempat.

Oleh karena itu daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi yang kuat untuk menopang pembangunan di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Salah satu sektor yang mampu menyumbangkan PAD diperoleh dari sektor pariwisata. pembangunan pariwisata diselenggarakan melalui proses yang dinamis bersama dengan sektor-sektor yang lainnya menuju ke arah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang lebih baik. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata secara umum tidak dipengaruhi oleh resesi atau situasi perekonomian dunia.

Di Indonesia keinginan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pariwisata didasarkan oleh beberapa faktor :

1. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa.

2. Merosotnya nilai ekspor pada sektor non migas.

3. Prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten.

4. Besarnya potensi bagi pengembangan pariwisata Indonesia

Sukses tidaknya pembangunan pariwisata pada saat ini sangat ditentukan oleh adanya dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya, karena dalam pembangunan pariwisata dewasa ini dituntut untuk membenahi diri dan menumbuhkan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap citra pariwisata di Indonesia. Komitmen ini penting karena sektor pariwisata saat ini kondisinya sangat terpuruk disebabkan oleh kondisi politik dalam negeri yang kurang aman dan stabil yang ditandai dengan timbulnya kerusuhan-kerusuhan massa yang merebak akhir-akhir ini.

Sektor pariwisata secara riil merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah, pengembangan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena posisi strategis Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada jalur utama poros Banyumas-CilacapPurbalingga-Semarang, yang memberikan peluang besar aliran kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dari Semarang atau Banyumas ke Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, Kabupaten Banjarnegara juga memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata yang

¹Spillane, James., 1994, *Pariwisata Indonesia*
~~*Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*~~,
Kanisius, Yogyakarta,1994,hlm.57



cukup besar dan sangat bervariasi serta memberikan kontribusi terhadap PAD.

2

Selain potensi obyek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Banjarnegara tersebut, terdapat juga even-even perayaan seperti Festival Serayu Banjarnegara, Culture Festival yaitu prosesi ruwatan pemotongan rambut gimbal, dan Syawalan yang juga dapat memberikan kontribusi pada PAD. Semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banjarnegara tersebut tentunya telah menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Berdasarkan hasil tabel pendapatan pariwisata tahun 2010 dan tahun 2011, masih belum memenuhi target yang ditentukan, masalah yang terdeteksi diatas disebabkan salah satunya adalah kurangnya strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara diarahkan pada wisata alam dan wisata budaya, di mana obyek wisata alam merupakan karakter wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan. Daya tarik utama adalah pemandangan dan gejala fisik alam yang dimiliki.

Seperti halnya wisata alam, peninggalan budaya juga memiliki daya tarik yang kuat kepada wisatawan. Untuk itu wisata budaya menjadi potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan. Obyek wisatawisata alam dan wisata budaya merupakan salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Banjarnegara yang sangat menarik untuk dikembangkan. Dalam suatu pengembangan obyek wisata diperlukan juga sebuah strategi sebagai suatu cara untuk mengembangkan obyek wisata tersebut, dimana strategi ini merupakan suatu strategi



pengembangan yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi dengan mendayagunakan seluruh potensi pariwisata. **Perumusan**

Masalah Permasalahan yang diajukan adalah

- : 1. Bagaimanakah strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara melalui sektor pariwisata, dan bagaimana mengatasi kendala yang ada?

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara melalui sektor pariwisata, dan bagaimana mengatasi kendala yang ada.

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum

Administrasi Negara pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata bagi organisasi yang bersangkutan.

Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif kualitatif sehingga penyajiannya berpangkal pada azas-azas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis, meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan pengawasan orang asing. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, maka dilakukan pula penelitian lapangan (*field research*).

C. Metode Pengumpulan Data

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer diperoleh dengan cara

melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum sekunder Untuk melengkapi dan

mendukung bahan hukum primer, maka diperlukan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan secara lisan dan langsung pada Pejabat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.

Pada penelitian lapangan juga dibutuhkan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer Data primer adalah data yang

diperoleh langsung dari subjek penelitian yang merupakan nara sumber dan terdiri dari Pejabat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara serta pihak lain yang dirasa perlu dan ada relevansinya dengan masalah penelitian ini.

2. Data Sekunder Data sekunder adalah berupa

dokumen dan arsip yang ada relevansinya dengan pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kepegawaian.

D. Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif karena hasil penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 16

menyeluruh dan sistematis mengenai strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara, kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata upaya mengatasi kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara melalui sektor pariwisata.

E. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis berdasarkan teori-teori hukum.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian A. Letak Geografi Kabupaten Banjarnegara

Banjarnegara merupakan sebuah kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah, Secara astronomi, Kabupaten ini terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jateng. Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan juga Kabupaten Batang di Utara, Kabupaten Wonosobo di Timur, Kabupaten Kebumen di Selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Barat.

Dalam Perda No.163 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sebagai

salah satu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penunjang dan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata. Kantor Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang pariwisata, yang meliputi: obyek wisata, sarana wisata serta pemasaran wisata. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang pariwisata.
- 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kepariwisataan
- 3) Pengelola retribusi obyek wisata.

Dalam rangka turut berpartisipasi melaksanakan pembangunan yang akan datang dan guna memberikan motivasi kepada seluruh aparat di dalamnya untuk lebih berkreasi dan berinovasi, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara telah memiliki visi yang telah disepakati bersama untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Visi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



Kabupaten Banjarnegara adalah :

“Terwujudnya Kebudayaan Dan Pariwisata Banjarnegara yang maju, dinamis berwawasan lingkungan dan berbasis pada masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan pembangunan daerah.”

Agar visi dapat terlaksana, maka ditetapkan misi Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya kebudayaan dan pariwisata yang ada menjadi sumber daya ekonomi yang lestari dan mampu menopang ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, pertumbuhan wilayah dan pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan profesionalisme kegiatan kebudayaan dan pariwisata melalui perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang ketat dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas potensi kebudayaan dan pariwisata yang ada melalui pengembangan sarana dan prasarana serta produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan dan pesona alam yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.
- 4) Mengembangkan / memperluas pasar

pariwisata melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah.

B. Strategi Pengembangan

Pariwisata Obyek Wisata Potensi Alam, Potensi Non Alam, Potensi Minat Khusus, Atraksi Wisata dan Budaya merupakan obyek wisata andalan di Kabupaten Banjarnegara yang sangat menarik untuk dikembangkan. Dengan segala potensi yang dimilikinya seperti debit air yang besar, udara yang sejuk dan pemandangan yang indah, area sumber air dapat dikembangkan menjadi suatu obyek wisata alam maupun budaya. Strategi pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai kepariwisataan melalui kegiatan yang terencana sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Strategi pengembangan pariwisata dapat dilihat dari: produk wisata, promosi wisata dan juga pelaksana.

Dalam strateginya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sudah cukup maksimal dengan cara membenahi sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara, selain itu banyak tugas yang di bebaskan pada Duta Wisata Kabupaten Banjarnegara untuk lebih dalam lagi memperkenalkan wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara kepada seluruh masyarakat baik dalam kota maupun luar kota. Dalam pengembangan suatu obyek wisata, maka tidak bisa terlepas dari adanya produk

wisata yang dimiliki oleh obyek tersebut, karena produk wisata merupakan faktor penunjang terjualnya barang komoditas wisata. Menurut Ngafenan (1991: 64) produk wisata merupakan segala aspek wisata yang dialami oleh wisatawan selama mengadakan suatu perjalanan wisata yang meliputi Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas. Pada produk wisata tentunya tidak bisa lepas dari adanya Atraksi wisata. Menurut pengertiannya Atraksi atau bisa juga disebut sebagai Obyek Daya Tarik Wisata merupakan keseluruhan potensi atraksi atau sumber daya wisata, baik berupa sumber daya wisata maupun budaya serta potensi lainnya yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan.

Berdasarkan data dokumentasi Master Plan Obyek Wisata Banjarnegara, maka rencana program pengembangan produk wisata adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan produk wisata tirta dan budaya Pokok program pengembangannya meliputi :

- a. penataan area penerima (pintu gerbang wisata, dan area parkir)
- b. pembenahan area kolam renang dan aliran sungai disertai pengembangan fasilitas ruang ganti baju, MCK, shower bilas, workshop penyewaan dan tempat sampah
- c. pembenahan panggung kesenian
- d. pembangunan fasilitas umum mushola

2. pengembangan produk wisata edukatif

pokok program pengembangannya meliputi :

a. pembangunan museum meliputi fasilitas visitor center, MCK, dan tempat sampah.

b. Pembangunan PLTA mini yang dilengkapi dengan fasilitas interpretasi dan fasilitas pendukung lain.

3. pengembangan produk berbasis wisata agro dan rekreasi keluarga Pokok program pengembangannya meliputi :

a. pembangunan kios buah dan sayur, yang menjual hasil bumi masyarakat desa sekitar.

b. Pembangunan taman santai yang difungsikan untuk area piknik dan *children playground*, berikut fasilitas bangku taman, *shelter/* gardu pandang, tempat sampah.

c. Pembangunan lahan pembibitan dan *botanic garden*

C. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara melalui sektor pariwisata, dan mengatasi kendala yang ada. Dalam rangka pengembangan produk wisata masih ditemui beberapa kendala seperti yang diungkapkan oleh bapak Sugeng . “Dalam pengembangan produk Waduk Mrica ini kami masih menemui beberapa kendala diantaranya :

1. Masih kurangnya SDM yang baik yang dimiliki Kantor Pariwisata
2. Anggaran yang diberikan oleh Pemda masih minim
3. Faktor pendukung seperti kondisi Infrastruktur belum memadai

Dan untuk mengantisipasi kendala tersebut, masih menurut bapak Sugeng yang juga mengungkapkan bahwa :

“Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan produk pariwisata ini upaya yang telah kami lakukan adalah:

1. Menyusun Master Plan agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan secara terarah serta bertahap
2. Menyelenggarakan SEMILOKA (Seminar dan Lokakarya)
3. Menyusun *Detail Engineering*

Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan pelaku wisata yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat agar kegiatan pariwisata tidak hanya dilaksanakan oleh pihak Kantor Pariwisata saja”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara melalui sektor pariwisata masih ditemui beberapa kendala yang dapat menghambat,

namun pihak Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih giat lagi dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata untuk terus berupaya mengembangkan produk wisata dari Sumber Air Ingas sehingga mempunyai kualitas dan daya saing tinggi.

Berdasarkan Master Plan Obyek kabupaten Banjarnegara disebutkan bahwa Rencana program Pengembangan pemasaran/ Promosi Obyek Wisata adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi bagi promosi dan sistem pariwisata daerah untuk mendukung pemasaran yang handal khususnya bagi obyek wisata. Pokok program pengembangannya meliputi :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan internet untuk promosi pariwisata daerah
 - b. Pemanfaatan internet untuk Sistem Informasi Pariwisata Daerah
2. Pemeliharaan pasar yang telah ada melalui peningkatan tawaran keragaman produk dan layanan wisata Pokok program pengembangannya meliputi ;
 - a. Pemantauan pasar wisatawan potensial (lokal, regional, nasional)
 - b. Penetrasi pasar wisata potensial
3. Pengembangan citra pariwisata (*Image Development*) Obyek Wisata sebagai upaya

positioning pemasaran pariwisata.

Pokok program

pembangunannya meliputi : a.

Pemanfaatan media massa

dan lembaga/ institusi daerah, nasional dan internasional untuk *image development*

b. Penyebarluasan informasi pengembangan kepariwisataan.c. Peningkatan kegiatan *public relation* khusus kepariwisataan Arung Jeram.

4. Aliansi strategis dengan mitra dan pesaing Pokok program

pembangunannya meliputi : a.

Kemitraan strategis

pengembangan paket wisata bersama lintas regional.

b. Kemitraan strategis pengembangan pemasaran lintas regional.

Sukses tidaknya pembangunan dan pengembangan pariwisata disuatu daerah sangat ditentukan oleh adanya dukungan serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, pihak pemerintah maupun pihak swasta. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena sektor pariwisata adalah sektor yang menyentuh hampir seluruh segi masyarakat yang dampaknya akan sangat berpengaruh pada masyarakat.

Karakter bisnis wisata mempunyai berbagai keunikan yang bila dikembangkan nicaya bisa ikut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Keunikan bisnis

8

wisata yang dimaksud adalah keterkaitan berbagai pihak, baik individu ataupun kelompok yang mempunyai andil dalam suatu kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pihak pemerintah, pihak swasta yaitu serta partisipasi masyarakat setempat. Keterkaitan berbagai pihak ini (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pembuatan suatu kebijakan disebut dengan *stakeholder*.

Untuk mencapai sasaran pengembangan pariwisata, pemerintah berusaha mendorong peran serta aktif masyarakat untuk pencapaian sadar wisata dan pelaksanaan sapta pesona. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam upaya pencapaian sadar wisata dan pelaksanaan sapta pesona adalah bagaimana sikap, tindakan, tanggung jawab dan keikutsertaan masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha menarik wisatawan untuk lebih lama tinggal didaerah tujuan wisata guna meningkatkan penerimaan devisa negara dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Kesimpulan 1. Strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup optimal, namun hasilnya masih belum begitu baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki dalam rangka promosi wisata. Dilihat dari *stakeholdernya*, partisipasi masyarakat dan



sektor swasta dalam pengembangan pariwisata sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat dan sektor swasta yang memberikan dukungan serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perbaikan kebijakan dibidang pariwisata. Yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara adalah kurangnya investor yang menanamkan modalnya sehingga akan mengakibatkan kekurangan dana dalam pengembangan pariwisata. Selain itu masih terbatasnya SDM yang profesional dalam rangka melayani jasa wisata. Pengaturan pengembangan pariwisata adalah Peraturan Daerah Nomor 163 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara

2. Untuk mengatasi kendala yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara melalui sektor pariwisata, yaitu pihak Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara meningkatkan hubungan kerjasama antara para pelaku wisata baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat didalam pengembangan pariwisata. Selain upaya dari pemerintah untuk menarik minat para investor agar mananamkan modalnya dalam pengembangan pariwisata a dengan memberikan kemudahan-kemudahan birokrasi seperti dalam hal

perijinan dan lain sebagainya. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada umumnya dan masyarakat disekitar obyek wisata pada khususnya ditingkatkan kesadarannya dan tanggung jawabnya dalam pengembangan pariwisata dengan ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Saran 1. Sebaiknya pemerintah dalam

hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan promosi wisata yaitu dengan mengembangkan promosi wisata yang terpadu serta memperluas jaringan promosi baik ditingkat regional maupun nasional. Selain itu diperlukan juga untuk membangun citra pariwisata yang baik melalui berbagai alat primosi baik melalui materi promosi cetak maupun media teknologi informasi

2. Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang pariwisata harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di dalam menghadapi kebutuhan pasar, antara lain dengan mengikuti diklat atau seminar seminar tentang pariwisata. Selain itu sebaiknya pihak Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara juga berupaya untuk melibatkan para pengembang besar untuk ikut bekerjasama dalam meningkatkan *skill* SDM di Kabupaten Banjarnegara yang terlibat dalam kegiatan atau bisnis pariwisata secara profesional dan terlatih.



Daftar Pustaka
BUKU-BUKU

Daramurti, Khrisna, 2000, dan Umbu Rauta, *Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Davey, Kent. J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta, VI Press

Heri Hermawan, 2004. dalam Jurnal Analisis Pengembangan Kebijakan pariwisata di Indonesia

Joeniarto, R, 2000, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Cetakan ke4, Bumi Aksara, Jakarta.

Junus, Siti Patimah, 2001, *Pembudayaan Otonomi Daerah Menuju Kemandirian Daerah*

Kaho., J, 1991, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mardiasmo, 2000, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Osborn, David dan Peter Plastrik, 2000, *memangkas Birokrasi : Lima strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Cetakan ke-1*, Penerbit PPM, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 2003 *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Spillane, James., 1994, *Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta

Stoner, 1992, *Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992. hlm. 118

Yoeti, Oka S, 1997, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perda N0. 163 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.

WAWANCARA Bapak Indra selaku Ketua PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) dan juga pemilik Hotel. (Banjarnegara, 19 Agustus 2013)

Bapak Joko selaku Kepala Bidang Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. (Banjarnegara, 19 Agustus 2013)

Bapak Prasetyo selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. (Banjarnegara, 19 Agustus 2013)

Masyarakat sekitar seruling mas. (Banjarnegara, 22 Agustus 2013)
Para wisatawan domestik. (Banjarnegara, 22 Agustus 2013)